

**DAMPAK PROGRAM BANTUAN SARANA PERIKANAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI LHOK PANGA *GAMPONG* KEUDE
PANGA KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA**

Jamaluddin¹, Afdhalul Hiza^{2*}, Asifa Usyifaini³

¹²³Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

lljamal964@gmail.com, hilzaafdhalul835@gmail.com, asifausyifaini@gmail.com

ABSTRACT

The fishing aid program has not been met according to the needs and empowerment of the Lhok Panga fishing community in Panga District, Aceh Jaya Regency through the development of fishing has not been implemented properly, so that traditional community empowerment activities do not have knowledge of fishing, let alone skills, so that the quality of traditional fishermen has not been optimally changed. Based on these problems, the researchers in this study formulated the following problem formulations: a) what is the impact of the implementation of the fishing aid program for fishermen in Lhok Panga, Panga District, Aceh Jaya Regency? b) how is the empowerment of fishing communities through the development of fishing in Lhok Panga, Panga District, Aceh Jaya Regency. To conduct research on the problem, the researcher used a qualitative research method with a descriptive approach. Then, to support this research, the researcher used concepts and theories, namely; the concept of impact, procedures for providing assistance, community empowerment, public policy theory, and the concept of implementing public policy. The technique for obtaining data by researchers used interviews and observations. The results of the study showed that the fishing community in Lhok Panga still believed in hereditary regulations regarding weather and fishing seasons when going to sea. However, after counseling and assistance for fishing facilities were provided by the government, only a few fishermen went to sea according to the new rules, and this had an impact on fish catch income, there was a change in the results. Then the researcher suggested to the government that there should be continuity in both counseling and assistance for fishing facilities that were in accordance with the aspirations of the fishing community.

Keywords : Assistance for Facilities, Fishing Equipment, Fishermen's Income

ABSTRAK

Program bantuan sarana perikanan tangkap belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat nelayan Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya melalui pengembangan perikanan tangkap belum terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tradisional belum memiliki pengetahuan terhadap perikanan tangkap apalagi keterampilan sehingga kualitas nelayan tradisional belum optimal perubahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: a) bagaimana dampak implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap nelayan di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya? b) bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan pada deskriptif. Kemudian untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan konsep dan teori yaitu; konsep dampak, prosedur pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat, teori kebijakan publik, dan konsep implementasi kebijakan publik. Teknik mendapat data peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Dari penelitian hasil menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Lhok Panga dalam ketika melaut masih percaya pada peraturan turun temurun baik terhadap cuaca dan musim ikan. Namun setelah penyuluhan dan bantuan sarana perikanan tangkap diberikan pemerintah baru sebagian nelayan turut melakukan melaut sesuai aturan baru, dan berdampak pada pendapatan ikan tangkap ada perubahan hasilnya. Kemudian peneliti menyarankan kepada pemerintah adanya keberlanjutan baik penyuluhan dan bantuan sarana perikanan tangkap yang sesuai dengan aspirasi masyarakat nelayan.

Kata Kunci : Bantuan Sarana, Alat Tangkap Ikan, Pendapatan Nelayan**A. PENDAHULUAN**

Nelayan merupakan suatu masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan matapencaharian utamanya adalah mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat diperairan pesisir dan laut, baik berupa ikan, udang, rumput laut, terumbu karang dan biodata laut lainnya. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan nelayan dari masyarakat lain, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan dilautan yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam berupa cuaca. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas usaha yang dijalankan sangatlah berfluktuasi dengan tingkat ketidakpastian hasil produksi yang sangat tinggi.

Namun demikian, nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam memajukan kehidupan manusia, khususnya dalam hal pemenuhan sumberdaya perikanan oleh segenap lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan asupan protein hewani. Tetapi faktanya tingkat kesejahteraan nelayan relatif tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi pada sektor lain. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memerlukan uluran/campuran tangan pemegang kebijakan baik dalam bentuk fasilitas ekonomi maupun regulasi sehingga supaya nelayan dapat terus melakukan kegiatan usahanya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

Berdasarkan aspek ekonomi, nelayan berperan penting dalam meningkatkan komoditi ekspor nasional dibidang sumberdaya alam terbarui (renewable resources), dikarenakan sifat sumberdaya perikanan yang dapat diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan sumberdaya alam kehutanan, tambang dan migas. Masyarakat nelayan termasuk agent of development yang paling reaktif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian pendapatan nelayan tergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan

(SDKP) yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup nelayan, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan merupakan sumber ekonomi utama bagi pengaruh keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan wilayah pesisir yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berakar dalam masyarakat nelayan.

Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat nelayan di Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya juga masih menghadapi berbagai kendala (constraint) klasik lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan (sustainability) usahanya seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan penguasaan modal dan akses informasi usaha, rendahnya adopsi tingkat teknologi yang digunakan, sehingga pemanfaatan sumberdaya belum optimal untuk mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh stake holder untuk menjaga keberlangsungan pembangunan perikanan tangkap, yang wujudkan dalam bentuk revitalisasi perikanan tangkap.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan seperti tersebut di atas, karena jukung yang dimiliki nelayan terbatas jumlahnya, ukurannya, dan kelayakan pakai yang berpengaruh terhadap keselamatan nelayan, hal ini juga terjadi pada motor/mesin tempel yang sebelumnya sangat sedikit yang dimiliki nelayan, bahkan nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional dengan mendayung, sehingga jalur penangkapannya tidak mencapai fishing ground. Demikian halnya dengan bantuan pancing dan jaring yang bermanfaat bagi nelayan untuk menambah jenis-jenis alat

penangkapan ikan, serta dapat meningkatkan produksi baik dari jenis dan ukuran ikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan pemerintah betul-betul berdampak terhadap implementasi program bantuan bagi nelayan di Lhok Panga Gampong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, terutama bentuk bantuan perikanan terhadap pengembangan Pelabuhan Penjualan Ikan (PPI), memberikan keterampilan kepada nelayan supaya dapat melakukan pengolahan hasil ikan, juga pemerintah dapat memberikan sertifikasi hak atas tanah nelayan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun prosedur pemberian bantuan harus didasarkan dari aspirasi masyarakat nelayan, baik peralatan penangkapan ikan dan modal usaha, sehingga memiliki manfaat yang dibutuhkan nelayan baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan dapat membebaskan para nelayan tradisional terhadap modal dari bangkir preman.

Namun faktanya dilapangan ketika peneliti melakukan observasi awal diketahui bahwa belum sepenuhnya terimplementasi program bantuan sarana perikanan tangkap baik dalam bentuk bantuan pengembangan Pelabuhan penjualan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta belum terlaksananya untuk pemberian sertifikasi hak atas tanah masyarakat nelayan sehingga belum meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan tidak sesuai prosedur sehingga sarana bantuan tidak berdasarkan aspirasi/kebutuhan masyarakat nelayan. Peralatan penangkapan ikan yang diberikan tidak semua bisa digunakan, dan juga pemberian bantuan modal usaha tidak tercapai maksud sehingga para nelayan meminta tambahan modal kepada bangkir preman yang bunganya sangat tidak sesuai dengan hasil tanggapan ikan, yang akhirnya masyarakat nelayan selalu terlilit utang.

Akibat tidak ada prosedur dalam pemberian bantuan sarana perikanan kepada para nelayan, maka pemberian bantuan itu tidak bisa bermanfaat sepenuhnya bagi nelayan. Nelayan skala kecil pada umumnya

masuk ke dalam kategori miskin yang hidup di kawasan pesisir, di mana hal ini menjadi isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir, sehingga usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik belum tercapai karena nelayan tradisional belum terbebaskan dari usaha modal dari bangkir preman.

Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap belum terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan tradisional belum memiliki pengetahuan terhadap perikanan tangkap, apalagi keterampilan yang akhirnya kualitas nelayan tradisional belum optimal perubahannya. Kemudian bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap belum tercapai dari tujuan pemberdayaan. Hal itu dapat diketahui karena untuk pengadaan bahan alat tangkap belum semuanya diberikan, ironisnya lagi alat keselamatan melaut bagi nelayan tradisional belum semuanya diberikan, dan penguatan kelembagaan nelayan kelompok tradisional hanya dalam berkomunikasi, tetapi pelaksanaannya belum ada.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap terhadap nelayan di Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
- b. Bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Lhok Panga Gampong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap terhadap nelayan di Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Lhok Panga *Gampong* Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Dampak

Dampak merupakan benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam makna lain pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang dipengaruhi, dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil, dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat Desa/*Gampong*) dapat dipahami pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian

dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Hal serupa menurut Usman (2014: 21) mengatakan bahwa “masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara”.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, Kesehatan, Pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah pada hal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan

kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Menurut Robinsan dikutip Payne dalam Dahuri dan Setepu (2014: 13-14) mengatakan bahwa Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien untuk mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan diri kecil tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan masyarakat Indonesia telah menjadi program nasional pemerintah dan swasta. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus utama pemberdayaan masyarakat di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui proses perencanaan masyarakat yang menghasilkan lapangan kerja dan berinvestasi pada proyek infrastruktur berskala kecil yang meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perkotaan. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan tradisional.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Untuk diketahui bahwa kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian kebijakan

berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan juga merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. Sejalan dengan uraian tersebut di atas, menurut Eulau dan Prewith dalam Marzali (2012: 23) bahwa “kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas adalah alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, Teknik dan sumber daya diorganisasikan secara Bersama-sama untuk menjalankan kegiatan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Menurut Wahab (2011: 43) mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Menurut Lane dikutip Wibawa dalam Wahab (2011: 44) menyatakan bahwa fokus perhatian implementasi yaitu Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program

dinyatakan berlaku, diantaranya adalah ; kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat. Kemudian implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian, **pertama**, implementasi = F (intention output, outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. **Kedua**, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (policy, formator, implementor, initiator, time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang peneliti peroleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, peneliti menyusun di lokasi penelitian, tetapi tidak peneliti tuangkan dalam bentuk dan angka-angka Penelitian kualitatif lebih menekankan kebermaknaan dari suatu informasi yang diperoleh sebagai data penelitian. Dan metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisa mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah tentu satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya, kemudian tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Karena itu, ketika ingin melakukan penelitian terlebih dahulu harus mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan untuk melakukan penelitian tersebut, pasalnya, perlu adanya pendekatan yang tepat supaya penelitian lebih mudah dijalankan..

Menurut Trisliatanto (2020: 7) mengatakan bahwa “merode penelitian kualitatif telah menjadi salah satu pendekatan yang paling penting dalam dunia penelitian. pendekatan dalam metode penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai fenomena manusia, sosial, dan budaya. Metode penelitian kualitatif dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengembangkan pengetahuan tentang dunia di sekitar.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap terhadap nelayan di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Untuk mendapatkan data sebagaimana dalam rumusan masalah, maka peneliti melakukan penelitian di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu :

1. Observasi.
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap sebuah objek/subjek secara langsung dan mendetail, dan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek/sujuk sasaran.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung maupun melalui telpon secara mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Studi Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan analisa dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap terhadap nelayan di Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

a. Bentuk bantuan perikanan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap bentuk bantuan perikanan, bahwa “perencanaan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lhok Panga hal yang sangat penting adalah kapasitas dan ketersediaan fasilitas-fasilitas pada PPI yang sampai saat ini belum sesuai standar dan kebutuhan. Seharusnya harus memiliki fasilitas penunjang seperti pelayanan sandar, dan labuh kapal perikanan serta pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan serta pengendalian sumber daya ikan, kemudian jenis perikanan ada dua yaitu perikanan tangkap kegiatan utamanya adalah menangkap ikan yang ada dalam perairan yang tidak dibudidayakan, dan perikanan budidaya jenis kegiatan perikanan dengan kegiatan utamanya adalah membudidayakan ikan dengan memelihara, membiakkan, ataupun memasarkan ikan dalam lingkungan terkontrol dan jelas kepemilikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa potensi perikanan tangkap di Lhok Panga Gampong Panga masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan juga masih mendominasi teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan alat penangkapan ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern

dan efektif. Ada beberapa pilihan bantuan yang diberikan pemerintah jaring insang/gillnet, terdiri dari jaring insang PA monofilament, trammel net PA monofilament, trammel net multifilament. Kemudian perangkap atau trap terdiri dari bubu lipat rajungan tipe kotak dan bubu lipat kepingan. Leih lanjut diberikan bantuan pancing ayau hook line terdiri dari pancing ulur dan rawai dasar. Sedangkan menu bantuan yang diberikan adalah permesinan kapal perikanan terdiri dari bantuan mesin tempel, mesin ketinting, dan mesin stasioner.

b. Prosedur Pemberian Bantuan

Dari hasil penelitian terhadap prosedur pemberian bantuan ditemukan bahwa “persyaratan bagi calon penerima bantuan baik perorangan/kelompok melakukan usaha di bidang perikanan serta belum pernah mendapat bantuan minimal tiga tahun terakhir. Serta baik individu maupun kelompok berada di dalam satu Gampong Panga. Kemudian memiliki bukti pencatatan perahu atau kapal perikanan bagi calon penerima bantuan sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan, dan memiliki dokumentasi alat penangkapan ikan bagi calon penerima bantuan perorangan tanpa perahu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa “salah satu kebijakan umum dan program pembangunannya adalah pada misi kedua yaitu memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi dan salah satu sarannya adalah meningkatkan nilai tukar nelayan. Untuk mencapai sasaran tersebut, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mempunyai program pembangunan daerah yakni program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan. Inovasi pembangunan

kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya dan khususnya di Lhok Panga Gampong Panga bertujuan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan, produksi dari hasil tangkapan maupun dari budidaya tidak akan memberi hasil yang maksimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan mutu hasil perikanan, peningkatan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana unit-unit pengolahan, penataan kelembagaan ekonomi dan pemasaran dari hasil perikanan baik domestik maupun ekspor

Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan Lhok Panga Gampong Panga berusaha meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan/pembudidaya berupa kegiatan-kegiatan pembinaan kelompok usaha bersama, kelompok pengolah, pdmasar, dan lain-lain. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada nelayan/pembudidaya ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Berkaitan dengan hasil tersebut, sangat perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program di UPTD Lhok Pangadalam rangka mencapai tujuan pengembangan kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan pembahasan peneliti, sesuai dengan pendapat Armawa dan Purnama (2016: 22) mengemukakan bahwa “dampak implementasi program bantuan sarana perikanan tangkap terhadap nelayan, bahwa Karakter utama dari kebijakan publik salah satunya yaitu kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik secara lebih konkrit dapat diamati dalam wujud rencana, program dan kegiatan. Untuk

mensukseskan kebijakan dibutuhkan suatu implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maknanya, prosedur pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan harus berdasarkan apresiasi masyarakat nelayan seperti kebutuhan peralatan penangkapan ikan, juga modal usaha.

c. Manfaat Yang Dibutuhkan Nelayan

Dari hasil penelitian peneliti terhadap manfaat yang dibutuhkan nelayan, bahwa “para nelayan tradisional sangat mengharapkan adanya bantuan modal usaha dari pemerintah, bila pemerintah mau melirik perihnya hati para nelayan. Manfaat dari peraturan perikanan bagi nelayan sangat besar, salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut agar tetap lestari, selain itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Namun demikian, akibat kurang perhatian dari pemerintah kepada para nelayan Lhok Panga, maka para nelayan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan modal harus kebergantungan kepada pengijon/tengkulak, dan tengkulak juga sebagai pedagang ikan dapat menekan harga ikan, karena para tengkulak dapat memonopoli pemasaran dan memainkan harga ikan hasil tangkapan nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa “perikanan merupakan hal yang sangat penting bagi para nelayan, manfaat yang besar bagi keberlangsungan sumber daya laut dan juga kehidupan para nelayan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dampak tertentu bagi kehidupan nelayan. Manfaat dari perikanan bagi nelayan Lhok Panga Gampong Panga sangatlah besar, salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan sumber daya

laut agar tepat lestari baik dalam menjaga populasi ikan agar tidak terlalu berkurang dan tetap terjaga keberlanjutannya. Selain itu, perikanan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dengan adanya peraturan yang mengatur ukuran dan jumlah tangkapan ikan, para nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan ang lebih baik. Hal ini juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Namun, di balik manfaatnya, peraturan perikanan juga memiliki dampak tertentu bagi para nelayan. Salah satunya adalah terbatasnya akses para nelayan ke wilayah perairan tertentu karena adanya zona-zona penangkapan yang ditentukan. Hal ini dapat membatasi ruang gerak para nelayan dalam mencari ikan. Hal ini sesuai ungkapan para nelayan di Lhok Panga di mana kami merasa terbatas dalam mencari ikan karena harus patuh pada zona-zona penangkapan yang ditetapkan, kadang-kadang para nelayan harus berlayar jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cukup. Meskipun demikian, peraturan perikanan tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan perlu mendukung upaya pemerintah dalam melindungi sumber daya laut demi keberlangsungan generasi mendatang.

2. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dikemukakan bahwa “pemberdayaan

merupakan salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain. Maka, upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak peresoalan-persoalan yang ada di masyarakat pesisir sebagai upaya meninhkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector ekonomi lain. Namun, proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembefdayaan Desa (LPMDes)). Permasalahan yang timbul adalah ketika LPMDes melakukan pemberdayaan hanya kepada masyarakat nelayan yang memiliki perahu dan tidak disampaikan kepada masyarakat nelayan buruh”.

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti melakukan pembahasan bahwa “peberdayaan merupakan salah satu konsep di dalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandinkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sektor pertanian, dan sektor perindustrian. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan di dalam mendongkrak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat pesisir (nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dapat disandingkan dengan sektor perekonomian lain. Lhok Panga Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya sebagai

wilayah pesisir laut, memilikipotensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada”. Hal ini sejalan dengan pembahasan peneliti sesuai dengan pendapat Usman (2014: 17-18) mengemukakan bahwa Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memberdayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan terhadap kekuatan-kekuatan penelan disegala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posiai masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar weperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek yang berbuat secara mandiri.

Nelayan di Desa/Gampong Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya termasuk dalam kelompok nelayan tangkap tradisional. Kelompok nelayan tangkap tradisional di Desa Panga di bagi menjadi nelayan besar dan nelayan kecil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, nelayan kecil adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT). Memberdayakan masyarakat nelayan berarti menciptakan peluang bagi masyarakat nelayan untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan, dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri”.

b. Bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap

Dari hasil penelitian terhadap bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan

melalui pengembangan perikanan tangkap, bahwa “fenomena permasalahan kemiskinan nelayan di Lhok Panga sudah berlangsung lintas generasi, kemiskinan nelayan itu tidak pernah berhinrti,meski diantara mereka mampu berpacu dengan tujuan teknologi, Ketika peneliti melakukan penelitian melihat kemiskinan para nelayan terbagi menjadi dua dua kategorisasi, pertama kemiskinan nelayan kultural, akibat dari kebiasaan nelayan yang berperilaku boros dan malas bekerja, yang kedua kemiskinan nelyan secara struktural karena disebabkan faktor struktur, kekuasaan sosial politik dan ekonomi yang tidak berpihak kepada nelayan. Nelayan di sini dapat peneliti maknai sebagai kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budidayanya, sehingga kehidupan nelayan itu sendiri masih jauh dari sejahtera, karena kondisinya belum diberdayakan secara optimal oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemauan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan Tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menagkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan Lhok Panga ini termasuk dalam kelompok nelayan tradisioanl. Kelompok nelayan tangkap tradisional di Gampong Panga nelayan besar dan kecil.

Perikanan nelayan kecil adalah yang orang mata pencahariannya penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (Gt). Memberdayakan masyarakat nelayan berarti menciptakan peluang bagi masyarakat nelayan untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan di Lhok Panga Gampong Panga sudah terlaksana selama 1 tahun lebih. Sasaran kegiatan pemberdayaan 2 kelompok nelayan yaitu kelompok nelayan besar dan kelompok nelayan kecil. Bentuk kegiatan pemberdayaan 2 kelompok nelayan tersebut berbeda-beda bentuk pemberdayaan untuk nelayan besar, yaitu berupa peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan bentuk pemberdayaan untuk nelayan kecil, yaitu berupa pengembangan alat tangkap dan pengautan kelembagaan. Peserta kegiatan pelatihan mesin merasakan manfaat yang sangat besar. Rata-rata mereka belum pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Ditunjang dengan tenaga profesional dan bahan praktek yang memadai, peserta banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang mesin dan perikanan, peserta dapat naik kelas mesin kapal perikanan.

Sistem multi gear adalah cara yang dilakukan oleh nelayan kecil dalam mengembangkan alat tangkap yang digunakan, di mana hal ini berkaitan dengan penambahan alat tangkap dan perbaikan alat tangkap yang rusak karena ambak atau ikan. Sistem ini membuat nelayan untuk menggunakan alat tangkap lebih dari satu jenis alat. Jenis alat

tangkap yang digunakan disesuaikan dengan musim operasinya sehingga hal ini akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan pendapatan setiap musimnya. Pembaruan alat tangkap membuat nelayan kembali beroperasi melaut. Pengembangan alat tangkap alat tangkap sebagai media bagi pengembangan alat tangkap sebagai media bagi nelayan meningkatkan perekonomiannya.

Kemudian pola pemberdayaan masyarakat nelayan Gampong Panga berbasiskan potensi dan kearifan lokal. Pertama dalam hal ini meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mesin kapal perikanan, bahwa mesin kapal yang digunakan sebagai media pelatihan dan pendidikan adalah mesin yang bisa dipakai oleh nelayan-nelayan di Gampong Panga, kedua dalam proses pembentukan kelembagaan nelayan kecil dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan proses alat tangkap untuk nelayan kecil menggunakan alat tangkap yang bisa dioperasikan oleh nelayan. Setelah dilakukan pemberdayaan diharapkan dapat menjadi kemandirian nelayan melalui adanya kelompok-kelompok nelayan yang membentuk kelembagaan sehingga dapat mencari solusi yang sesuai dari berbagai masalah yang dialami oleh anggota nelayan mulai merintis setiap kegiatan yang ada.

Berdasarkan dari kesimpulan dimensi, analisis pembahasan dan menurut pendapat para ahli tersebut di atas, maka dampak program bantuan sarana perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan pembangunan ekonomi para nelayan. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius

akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan wilayah khususnya.

Pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan muncul berbagai fakta dan fenomena baru di tengah-tengah masyarakat nelayan. Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan dampak terhadap penerimaan secara ekonomi bagi nelayan dari hasil tangkapan. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan turun-menurun dan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Dalam masyarakat nelayan ditemukan adanya kelas pemilik dan kelas pekerja. Kelas pemilik yang dapat dinyatakan sebagai juragan, kesejahteraan relatif lebih baik karena menguasai faktor produksi seperti kapal, mesin alat tangkap maupun faktor pendukung seperti es, garam dan lainnya. Kelas pekerja atau penerima upah dari pemilik merupakan mayoritas, dan walaupun mereka berusaha memiliki sendiri alat produksi umumnya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya kurang berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan. Pendapatan masyarakat nelayan berpengaruh terhadap kualitas hidup nelayan karena pekerjaan nelayan merupakan sumber pendapatan utama, yang tentunya juga berpengaruh terhadap cara pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah pesisir berdasarkan kearifan lokal.

E. KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian terhadap Dampak Program Bantuan Sarana Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan

Di Lhok Panga Kabupaten Aceh Jaya maka dapat disimpulkan :

1. Bentuk bantuan sarana perikanan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan yang secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup para nelayan Lhok Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, Namun pada kenyataannya pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan perikanan bagi nelayan tangkap belum sesuai dengan kebutuhannya.
2. Prosedur pemberian bantuan merupakan hal yang wajar, supaya bantuan yang diberikan tidak menyalahi peraturan, selain itu yang tak kalah penting bahwa nelayan yang akan menerima bantuan wajib memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), mengingat ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh nelayan. Jadi walau mereka tergabung dalam kelompok, jika tidak bisa dibuktikan dengan keanggotaannya tidak bisa disalurkan.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan bukan sekedar memberi bantuan kepada masyarakat nelayan, tetapi juga harus berupa memberikan dorongan untuk membangun kekuatan dari dalam yang mampu melahirkan solusi yang lebih tepat sasaran dengan upaya sendiri dan bukan hanya sebagai penerima resep bantuan dari eksternal..
4. Bentuk Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap, di mana pemberdayaan dalam konsep ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk lebih percaya diri supaya berani

melakukan apa yang mereka mau dan bisa lakukan atas potensi yang dimiliki karena sebelumnya masyarakat nelayan menggunakan kapal berbahan kayu melalui bantuan pemerintah berubah menjadi kapal berbahan fiber dan sudah dilengkapi mesin, GPS, atau alat penentu arah dan alat tangkapan itu sendiri. Dan dengan adanya penguatan kelembagaan para nelayan dapat memperkuat kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk mampu menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Namun, baik bantuan pengadaan bahan alat tangkap, alat keselamatan melaut serta penguatan kelembagaan belum semua masyarakat nelayan terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani (2014) *Sosiologi (Sistematika, Teori, Dan Terapan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Adam, Lukman (2015) *Kebijakan Perlindungan Dan Pembudi Daya Ikan*. Bogor: IPB Press.
- Arikunto, Suharsimi (2012) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Arnawa Dan Purnama (2016) *Bantuan Sarana Perikanan Tangkap terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwas, Oos M (2014) *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Azizi Dan Fahrudin (2017) *Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Nelayan Akibat Variabilitas Iklim*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan (2013) *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Dahuri (2013) *Keanekaragaman Hayati Laut*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dansu (2011) *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2017) *Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan*. Jakarta: Kementrian Kelautan Dan Perikanan.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2016) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Flex Media Kompatindo.
- Hartono (2013) *Strategi Penangkapan Ikan*. Bogor: IPB Press,
- Kusnadi (2011) *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara
- Kusnadi (2011) *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media..
- La Ola, Lo (2011) *Ekonomi Perikanan*. Kendari: UNHALU Press.
- Ma'arif, R (2016) *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengembangan Perikanan Tangkap*. Surabaya: UNMUHA Press.
- Madani, Muhlis (2011) *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzali, Amri (2012) *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyawan, Rohman (2016) *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*. Bandung: UNPA Press.
- Moleong (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasihun, J (2011) *Mencari suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berpradigma Ganda Dalam Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Purnomo Dan Sujatwati (2015) *Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir. Dan Aplikasi Strategi Adaptasi*. Bandung: ITB Pres
- Putri Dan Darmawi (2021) *Bantuan Alat Tangkap Gilnet Terhadap pendapatan Nelayan*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Rahmawati (2013) *Produksi Perikanan Tangkap Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rokhmawati, A (2016) *Karakteristik Nelayan Dan Pendapatan Nelayan*. Cilacap: UNMUHA Purwokerto Press.
- Rukyati, Ajat (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV. Andi Utama.
- Slamet, Yulius (2019) *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sejarwan, Wiratna (2014) *Metodologi Penelitian (Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami)*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Suharto, E (2017) *Pembangunan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Adutama.
- Sudirman Dan Mallawe (2014) *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta: PT. Renike Cipta.
- Usman, Sunyoto (2014) *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin (2011) *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Theresia, H (2015) *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Thudan (2012) *Data Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Velentina, Wardany dan Mariana (2020) *Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Surabaya: UNMUHA Press.
- Wahab, Abdul Sholichin (2011) *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implmentasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.